

**KINI DAN DULU: BERAS DALAM PERKEMBANGAN POLITIK
EKONOMI DAN REFLEKSI HISTORIOGRAFI INDONESIA**

Refi Refiyanto

Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada
refi.refiyanto@gmail.com

Abstrak

Pandemi Covid-19 telah mengingatkan kembali terhadap pandemi Flu Spanyol, yang terjadi sekitar seabad yang lalu. Sebagaimana pandemi Covid-19 dengan pandemi Flu Spanyol, nyata sekali permasalahan beras juga terjadi seabad yang lalu. Pola yang hampir mirip terlihat pada kebijakan impor yang dilakukan akibat persediaan yang mencukupi menjadi dasar kebijakan tersebut diambil. Keadaan masa lalu diperparah dengan Perang Dunia I yang menyebabkan pemutusan impor beras ke Hindia Belanda. Kekurangan beras berarti merujuk pada kesejahteraan penduduk yang buruk. Akibatnya kebijakan kesejahteraan masa lalu difokuskan untuk memperbaiki pertanian padi. Ide tersebut ternyata sudah ada sejak awal abad-19. Ide kesejahteraan ini pada akhirnya selalu mengalami perkembangan hingga pasca kemerdekaan. Perkembangan ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti: proses interaksi pemerintah dan penduduk bumi putra, teknologi, dan perkembangan ekonomi uang. Pasca kemerdekaan sektor ekonomi tidak lagi tertuju pada sektor pertanian melainkan manufaktur off farm dan permasalahan beras menjadi isu yang sedang hangat serta cukup pelik.

Kata Kunci: Kini, Dulu, Beras, Politik, Ekonomi, Historiografi Indonesia

Abstract

The Covid-19 pandemic has brought back memories of the Spanish Flu pandemic, which occurred about a century ago. Like the Covid-19 pandemic with the Spanish Flu pandemic, it is very clear that the rice problem also occurred a century ago. A similar pattern can be seen in the import policy implemented due to sufficient supplies being the basis for the policy. The past situation was exacerbated by World War I which led to the termination of rice imports to the Dutch East Indies. Lack of rice means referring to the poor welfare of the population. As a result, past welfare policies were focused on improving rice farming. This idea has been around since the early 19th century. This idea of welfare in the end always develops until post-independence. This development is caused by several factors such as: the process of interaction between the government and the natives, technology, and the development of the money economy. Post-independence the economic sector is no longer focused on the agricultural sector but off-farm manufacturing and the rice problem has become a hot and quite complicated issue.

Keywords: Present, Past, Rice, Politics, Economy, Indonesian Historiography

PENDAHULUAN

Saat ini dunia tengah diramaikan isu pandemi Covid-19 yang telah menyita banyak perhatian khalayak. Sekitar seabad yang lalu, tepatnya tahun 1918, dunia digemparkan dengan hal yang hampir serupa yaitu pandemi Flu Spanyol. Kembalinya ingatan pandemi Flu Spanyol dalam masyarakat tentu tidak dapat diabaikan dari sumbangsih beberapa tulisan (<https://historia.id>, diakses pada 8 September 2021, pukul 11:52 WIB; Ravando Lie, 2020). pandemi Covid-19 selain menyoroti masalah kesehatan juga memberikan permasalahan pada sektor ekonomi dan pangan. FAO (Food and Agriculture Organization) memperkirakan jumlah orang yang kekurangan gizi akibat pandemi akan meningkat hingga 132 juta. Selain itu dalam mengatasi permasalahan tersebut perlu diciptakan ketahanan pangan. Fokus ketahanan pangan bukan pada hal produksi, melainkan ketersediaan, stabilitas, dan akses bagi masyarakat yang rentan secara ekonomi (<https://republika.co.id>, diakses pada 8 September 2021, pukul 09:53 WIB; <https://www.beritasatu.com>, diakses pada 8 September 2021, pukul 09:47 WIB).

Di Indonesia, pembatasan mobilitas akibat pandemi Covid-19 telah membawa fokus penanganan pada upaya memperkuat lumbung pangan. Sejak program berbasis masa lampau, permasalahan pangan hampir berfokus pada masalah beras. Dalam upaya memperkuat lumbung pangan sendiri masih menuai perhatian terutama beberapa daerah di luar Pulau Jawa. Pasalnya beberapa program lumbung pangan masa lampau dengan fokus percetakan sawah dinilai mengalami kegagalan dan menimbulkan kerusakan lingkungan. Opini menguraikan permasalahan justru terletak pada distribusi dan pemasaran produk. Sementara mengenai produksi yang menerapkan pembukaan lahan pertanian baru dapat diganti dengan memperkuat sistem intensifikasi terutama di wilayah transmigran. Selain memperkuat lumbung pangan pemerintah masih memiliki program lain melalui fasilitas cadangan pangan, fasilitas pemasaran komoditas pertanian, dan jaring pengaman sosial. Dengan demikian, upaya menjaga pangan saat pandemi Covid-19 dikhususkan pada ketersediaan pangan melalui distribusi dan kelangkaan yang berdampak pada melonjaknya harga (<https://www.kompas.com>, diakses pada

8 September 2021, pukul 11:33 WIB; <https://m.bisnis.com>, diakses pada 8 September, pukul 10:05 WIB).

Isu beras sendiri tampaknya menjadi isu yang ramai dibicarakan bukan hanya saat masa pandemi saja. Pasalnya hampir setiap tahun, Indonesia juga selalu dihadapkan oleh isu tentang ketersediaan dan harga, terlebih saat hari-hari besar nasional dan menjelang pemilihan umum. Contoh kasus yang belum lama ini terjadi, tepatnya pada Februari dan September 2018, tersiar berita tentang kegaduhan mengenai permasalahan impor beras antara kementerian perdagangan, pertanian, dan Badan Urusan Logistik (Bulog). Dalam kasus tersebut Ombudsman menyoroti bahwa kebijakan impor beras dan komoditas lain (garam, gula, dan jagung) untuk dipertimbangkan oleh pemerintah, apa lagi di tengah tahun politik (<https://m.cnnindonesia.com>, 27 Agustus 2018, diakses pada 29 Juni 2019, pukul 14:32 WIB; <https://ekonomi.kompas.com>, diakses pada 29 Juni 2019, pukul 20:14 WIB).

Terlepas dari kebutuhan yang memang diperlukan, isu impor sering kali menjadi bahan politisasi yang seksi dan menjadi warna tersendiri bagi perpolitikan di Indonesia. Dalam kontestasi tersebut, tidak jarang program perbaikan pangan (terutama beras), menjadi jargon oleh masing-masing kubu yang sangat diperhatikan (<https://www.jawapos.com>, diakses pada 29 Juni 2019, pukul 20:24 WIB).

Upaya impor yang dilakukan pemerintah tentunya tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan beras nasional. Impor dan distribusi bukan sekadar mencukupi kebutuhan pangan penduduk, melainkan juga bagaimana akses melalui stabilitas harga dapat dipenuhi. Munculnya politisasi beras identik dengan keadaan yang tidak stabil dan akan semakin santer menjelang pemilihan umum. Kemudian Permasalahan tersebut akan sangat pelik ketika pandemi Covid-19 dan pembatasan mobilitas sebagaimana kini terjadi. Alih-alih permasalahan beras dan pandemi Covid-19 masa kini, ternyata pandemi Flu Spanyol juga telah membawa permasalahan beras pada masanya. Bertolak dari hal tersebut tentu timbul pertanyaan pokok dalam melatarbelakangi tulisan ini, apa relevansi dari permasalahan beras kini dan dulu? Dari pertanyaan pokok tersebut kemudian timbul pertanyaan turunan seperti: mengapa permasalahan beras masa kini terjadi,

apa ada hubungannya dengan masa lampau? Jika ada, lalu bagaimana perkembangan beras masa lampau, terutama pada hal kebijakan politik ekonomi? Dan terakhir, apa dampak dari kebijakan beras masa lampau pada masa kini?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi sejarah yang melalui empat tahapan. Tahapan yang dimaksud yaitu tahap heuristik, kritik sumber, interpretasi, kemudian diakhiri dengan historiografi. Tahapan pertama yang dilakukan yaitu heuristik atau usaha pencarian sumber yang terkait dengan topik penelitian (Helius Sjamsuddin, 2007: 86). Di dalam tulisan ini penulis menggunakan sumber primer berupa arsip terbitan resmi seperti *Indisch Verslag* dan *Kolonial Verslag*. Keberadaan sumber primer tersebut juga dilengkapi oleh sumber sekunder dari berbagai literatur.

Tahap selanjutnya yaitu kritik sumber untuk menguji keautentikan dan kredibilitas dari sumber-sumber baik primer maupun sekunder yang berhasil dikumpulkan. Kemudian masuk tahap interpretasi untuk menafsirkan dan merangkai fakta sejarah yang telah diperoleh dari sumber. Kemudian tahap terakhir yaitu historiografi untuk menyampaikan hasil yang ditulis secara kronologis dalam bentuk tulisan sejarah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Beras Seabad yang Lalu

Penyebaran Flu Spanyol di Hindia Belanda terbagi dalam dua gelombang: pertama, Juli hingga September 1918, kedua, Oktober hingga Desember 1918, dengan memakan korban kurang lebih sebanyak 1,5 juta jiwa (<https://historia.id>). Menurut Bambang Sulistyio kasus paling parah di Jawa terjadi di Yogyakarta dan Trenggalek. Di Yogyakarta jumlah kematian mencapai 25.956 jiwa pada kuartal pertama tahun 1919, dan 12.577 jiwa pada kuartal kedua. Kemudian Bambang Sulistyio menambahkan bahwa banyaknya korban jiwa disebabkan karena penduduk kekurangan gizi dan menurunnya imun tubuh. Kekurangan gizi ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kelangkaan beras, kenaikan harga

beras, gagal panen akibat musim hujan yang datang terlambat dan curah hujan yang sedikit (Bambang Sulistyono, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995: 61-62).

Pada dekade kedua abad-20 dunia sedang dilanda Perang Dunia I, yang dalam hal ini berdampak pada Hindia Belanda. Di sektor pangan, menjelang akhir 1917 dengan diperpanjangnya penutupan pelabuhan dan langkanya kapal pengangkut menyebabkan impor beras dari Burma dan Indochina (Perancis) tidak dapat dilakukan. Kemudian pada 1918, semua pasar beras kecuali Siam ditutup, pemerintah mengambil kebijakan menjaga persediaan pangan dalam negeri. Kebijakan yang diambil yaitu dengan mendorong perluasan penanaman padi di sawah dan padi gogo, termasuk di perkebunan Eropa untuk menyediakan lahan padi gogo. Kebutuhan akan impor beras di Hindia Belanda ini sudah dilakukan sejak sebelum pergantian abad-20. Akan tetapi baru 1911, pemerintah mulai melarang ekspor beras dan menjadi indikasi bahwa ketersediaan beras dalam negeri mulai mengalami krisis (G. H. A. Prince, “dalam Thomas Lindblad, 2000: 237-238; Suzanne Moon, 2007: 76).

Dalam kebijakan perluasan penanaman padi, pemerintah berharap untuk mengurangi sekitar 25% lahan perkebunan tebu. Dalam proses penetapan keputusan tersebut terjadi perdebatan yang cukup alot, terutama dari pihak perkebunan dan pengkritiknya baik orang Eropa maupun penduduk bumi putra. Pasalnya pihak perkebunan merasa keberatan dengan dalih mempertahankan status quo sebagai perusahaan yang memberi keuntungan terhadap negeri Belanda. Dari penduduk bumi putra, Abdul Muis yang merupakan salah satu perwakilan SI di dalam *Volksraad* menyarankan secara radikal untuk menganjurkan untuk dilakukan pengembalian lahan kepada petani. Melalui narasi petani yang saleh (sebagai *counter* narasi petani yang malas), Abdul Muis mengutarakan keinginan petani untuk bertani sebagaimana keinginannya tentu mereka akan bekerja dengan keras dan berbudi luhur, serta tidak akan terseret ke dalam kemiskinan dan kelesuan moral. Kemudian Abdul Muis menambahkan, jika pemerintah menginginkan perluasan pasokan beras, maka hanya perlu mengizinkan lebih banyak petani untuk melatih keinginan bawaan mereka untuk bertani (Suzanne Moon, 2007: 81).

Lebih ke belakang upaya mengatasi permasalahan beras dalam negeri tentu tidak dapat dipisahkan dari ditetapkannya Politik Etis dan dibentuknya Departemen Pertanian pada dekade pertama abad-20. Dalam perkembangannya cita-cita etis ini bukan sekadar upaya memperbaiki permasalahan beras saja, melainkan mengubah maupun mempertahankan standar kehidupan masyarakat bumi putra. Dalam tulisannya, Prince mengutarakan bahwa kebijakan pertanian yang direpresentasikan kedalam kebijakan ekonomi di negeri jajahan dikatakan unik. Masalah beras di Hindia Belanda tidak dapat didekati dengan masalah-masalah struktural, melainkan perlu adanya pengalaman baru kemudian mendiagnosa dan mengatasinya 9 G. H. A. Prince, “dalam Thomas Lindblad, 2000: 225). Permasalahan adat dan cara pikir penduduk bumi putra merupakan suatu tantangan tersendiri yang harus dihadapi pemerintah, juga tidak dapat dilepaskan oleh sektor industri pertanian ekspor, tentu akan menyebabkan kebijakan yang cenderung dualistik yang mana nantinya menjadi perkembangan tersendiri.

B. Perkembangan Kesejahteraan Abad-19

Istilah kesejahteraan dalam cita-cita etis pada perkembangannya tidak dapat dilepaskan dari ide kesejahteraan masa awal kolonialisasi di Hindia Belanda (Jawa) awal abad-19. Ide kesejahteraan ini tidak dapat dipisahkan dari paham liberal yang muncul sejak akhir abad-18 di Eropa. Adapun deretan tokoh penggagas ide ini yaitu Dirk Van Hogendorp, Raffles, dan Du Bus Gisignies. Ide Dirk Van Hogendorp merujuk pada model yang dilakukan EIC di India dengan memperjuangkan penghapusan penyerahan paksa dan rodi, serta mengganti dengan perdagangan dan tenaga kerja bebas. Untuk menciptakan iklim tersebut langkah awal yaitu perlu pembebasan tanah dari milik bersama di masyarakat menjadi individu secara turun-temurun. Hogendorp menambahkan bahwa tanah komunal dalam sistem feodal masyarakat merupakan akar dari macetnya ekonomi penduduk bumi putra (D. H. Burger, 1962: 145-146).

Ide Hogendorp tersebut telah menginspirasi Raffles dalam menjalankan kebijakan kolonial di Jawa. Jika Hogendorp masih pada taraf ide, maka Raffles mulai mempraktekannya. Selain mempraktekan ide Hogendorp, Raffles mengubah

monopoli penyerahan paksa dan rodi ala VOC menjadi persewaan tanah. Transformasi ini memiliki tujuan seperti individualisasi tanah turun-temurun yang harus didukung dengan kepastian hukum baik kepemilikan maupun hak untuk berusaha. Kepastian hukum ini pada akhirnya akan mendorong penduduk melakukan usaha untuk meningkatkan taraf ekonominya sebagaimana dalam iklim ekonomi liberal. Dengan begitu pada akhirnya pemerintah hanya sebagai pedagang dan urusan produksi diserahkan kepada penduduk bumi putra.

Selain itu Raffles memandang bahwa ikatan feodal merupakan penghambat perubahan, sehingga dilakukan pelemahan terhadap kekuasaan feodal. Akibatnya masa pemerintahan Raffles dikenal juga sebagai masa pelemahan kekuasaan para bupati yang dilakukan tanpa kendala, karena pemerintah memberi gaji sebagai ganti penyerahan pajak dari penduduk. Selanjutnya dalam menciptakan iklim liberal melalui ekonomi uang, Raffles memberlakukan pajak kepala berupa uang. Pada akhirnya disadari bahwa masih kuatnya mentalitas dan ikatan adat di dalam masyarakat bumi putra menyebabkan upaya perubahan ini mengalami perkembangan yang lambat. Perubahan yang lambat ini menyebabkan tujuan mencapai keuntungan melalui cara ekonomi liberal juga terhambat. Pada sisi lain akibat keadaan keuangan yang mendesak baik di negeri Belanda (Perang Kemerdekaan Belgia) dan di Hindia Belanda (Perang Diponegoro), maka pada 1826, Raja Wilhem I mengutus Du Bus Gisignies untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Dalam mengatasi permasalahan tersebut langkah awal yang dilakukan Du Bus yaitu upaya penghematan dan melakukan rencana landasan pembangunan. Sebagai landasan rencana tersebut Du Bus menilai bahwa defisit keuangan disebabkan sektor komoditas ekspor belum maksimal. Untuk memaksimalkan keadaan tersebut perlu adanya iklim ekonomi liberal sebagaimana yang terjadi di Eropa, dengan cara liberalisasi tanah serta menciptakan ekonomi uang melalui pajak uang dan pertanian ekspor, sama seperti anggapan Hogendorp dan Raffles. Akan tetapi penduduk bumi putra di Jawa belum terdiferensiasi dengan komposisi ekonomi yang dicitrakan mandek dan pasif sehingga tidak ada keinginan untuk lebih memajukan usahanya dibidang ekonomi uang (Frans Husken, 1998: 17-19).

Bertolak dari landasan tersebut Du Bus melanjutkan pada upaya pembukaan lahan bagi tanaman komoditas ekspor dan penggunaan modal dari luar. Menurut Du Bus ada alternatif lain dengan mengerahkan pekerja bumi putra di lahan-lahan pertanian baru yang jauh dari desa. Akan tetapi seringkali mereka tidak mau pergi terlalu jauh dari lingkungan tempat tinggalnya. Dengan begitu jalan keluar yang harus ditempuh yaitu pembukaan lahan melalui investasi modal asing. Pembukaan investasi modal asing sendiri dirasa belum siap dilakukan, mengingat keadaan negeri Belanda yang masih agraris juga keadaan di Jawa yang masih perlu dibenahi, menyebabkan ide Du Bus ditolak. Bersamaan dengan itu Van Den Bosch menyarankan agar pemerintah mengambil alih dalam upaya eksploitasi di Jawa. Bosch mengamini jika penduduk belum terdiferensiasi dan perlu rangsangan dari luar untuk berubah, akan tetapi saat sekarang belum siap. Pada akhirnya Bosch menggantikan Du Bus pada 1830 dan langkah yang dilakukan dalam usaha komoditas tanaman ekspor dengan paksaan yang melibatkan birokrat lokal sehingga apa yang disebut sistem *Cultuur Stelsel* (Tanam Paksa). Menurut Bosch, tanpa paksaan industrialisasi tidak akan terjadi, untuk mempersiapkan hal tersebut maka masa Tanam Paksa seperti mempersiapkan kearah pembukaan modal asing hingga tahun 1870 (Clifford Geertz, 1976: 69).

Kegagalan ide kesejahteraan awal melalui liberalisasi tanah ramai diperbincangkan pada tahun 1874-1878. Pasalnya baru dipahami bahwa individualisme dalam kepemilikan tanah tidak dapat dipaksakan dari atas melainkan berkembang dengan sendirinya (D. H. Burger, 1962: 185). Pemahaman tersebut juga mempengaruhi Sollewijn Gelpke dalam program modernisasi pertanian di Tulungagung. Sebagai pegawai pemerintah dan ahli pertanian, Gelpke mengutarakan bahwa pertanian padi yang dilakukan oleh penduduk merupakan sebuah kerugian, kecuali 3 wilayah, yaitu: Pasuruan, Banyuwangi, dan Besuki. Maksud kerugian disini adalah dalam proses produksi meliputi biaya, tenaga, dan waktu hampir selalu mengalami kerugian dibandingkan dengan hasil panen yang diperoleh. Gelpke menambahkan kurangnya pengetahuan teknis dan lebih mengedepankan tahayul menjadi akar permasalahan yang terjadi (J. H. F. Sollewijn Gelpke, 1874: 111).

Dalam surat yang ditujukan kepada pemerintah, Gelpke menganjurkan agar perlu dilakukan perbaikan dalam pertanian padi penduduk. Hal ini didasarkan pada alasan semakin bertambahnya jumlah penduduk Jawa, sehingga semakin banyak membutuhkan pasokan beras. Sementara jumlah lahan pertanian tidak mengalami perluasan yang signifikan. Selain itu dengan peningkatan teknik, diharapkan efisiensi lahan dan waktu dapat dialihkan kedalam proses penanaman tanaman niaga. Dalam upaya perbaikan tersebut Gelpke menggunakan contoh pertanian padi di Italia yang dianggap paling baik diantara pertanian padi di berbagai daerah di dunia. Penerapan pertanian padi di Italia menerapkan metode pengolahan tanah, penggunaan benih, penanaman, irigasi, penggunaan pupuk, dan penyiangan dengan menggunakan cara-cara teknis ilmiah. Gelpke menyadari bahwa penerapan yang dianggap cocok di Italia belum tentu cocok di Jawa, sehingga perlu dilakukan penyesuaian melalui percobaan yang melibatkan penduduk, dengan harapan terjadi proses pengajaran. Dalam proses pengajaran tersebut para penyuluh diharapkan agar tidak bertentangan dengan kepercayaan penduduk asalkan secara konteks perubahan secara perlahan dapat dicapai (J. H. F. Sollewijn Gelpke, 1874: 189-190).

Ide perbaikan tersebut nyata sekali dipraktikkan Gelpke saat melakukan sejumlah percobaan di Tulungagung (sebelumnya bernama Ngrowo) pada 1875-1876. Di Tulungagung upaya percobaan melibatkan 20 bidang lahan milik penduduk dengan pengajaran diarahkan pada pengolahan lahan yang lebih baik, praktek penanaman berbaris, pemanfaatan pupuk, dan pertukaran benih (J. H. F, Sollewijn Gelpke, 1877: 8-9). Kendati percobaan telah menghormati adat lokal dan menjaga hubungan yang baik, pada akhirnya disadari bahwa perlu bertahun-tahun agar penduduk menerapkan sesuai apa yang diterapkan pemrakarsa. Akan tetapi keberhasilan yang kemudian diterapkan penduduk dari percobaan ini yaitu metode penanaman berbaris dan berjangka (J. H. F, Sollewijn Gelpke, 1877: 11 dan 15).

C. Perkembangan Kesejahteraan Awal Abad-20

Politik Etis tahun 1901 tidak tentu tidak dapat dipisahkan dari banyaknya laporan tentang menurunnya kesejahteraan penduduk bumi putra. Dalam upaya

memperbaiki keadaan tersebut, para reformer etis percaya bahwa kesejahteraan penduduk erat kaitannya dengan hasil tanaman pangan. Akibatnya pada 1905 dibentuk Departemen Pertanian yang mana sebelumnya urusan pertanian masuk dalam Departemen Pendidikan dan Pegawai Negeri, yang berpusat di Bogor dengan direktur pertama bernama Melchior Treub. Dengan begitu dalam bidang pertanian pangan, slogan: irigasi, pendidikan, dan emigrasi merujuk pada tahapan: meningkatkan teknologi irigasi, meningkatkan padi lebih banyak, sekolah kejuruan dengan pendidikan teknik dan teknologi baru, serta mengirim penduduk ke luar Jawa dengan tujuan membuka pertanian baru (G. H. A. Prince, “dalam Thomas Lindblad, 2000: 247; Suzanne Moon, 2007: 20).

Pada masa awal berdirinya Departemen Pertanian, arah kebijakan dipusatkan pada penggunaan teknologi baru. Hal ini merujuk pada beberapa pertimbangan seperti kebijakan ekonomi yang disokong dengan teknologi mencerminkan tren yang sedang berkembang saat itu serta masalah kesejahteraan penduduk berasal dari karakter mereka sendiri sehingga perlu adanya inovasi. Treub menyakini bahwa kemiskinan penduduk bukan disebabkan kemalasan, tetapi dengan keadaan alam yang kaya maka diperlukan adanya inovasi melalui teknologi. Akibatnya masa kepemimpinan Treub, arah kebijakan berfokus pada masalah teknis penelitian ilmiah. Treub mengkritik apa yang dilakukan para penyuluh terdahulu (bagian dari Binnenland Bestuur) yang melakukan penyuluhan tanpa dibekali teknik ilmiah. Hal ini menyebabkan proyek peningkatan amatir sering memberikan bencana pada penduduk, sehingga tidak dapat dipercaya kembali (Suzanne Moon, 2007: 2 dan 34).

Proyek yang dilakukan Treub pada akhirnya mendapat kritikan karena dianggap kurang memberikan dampak yang dramatis bagi kesejahteraan penduduk. Kritikan tersebut menekankan bahwa proyek Treub hanya pada kajian ilmiah, dan bukannya melakukan pendekatan yang akrab pada penduduk. (mengajar dan membimbing). Dengan banyaknya kritikan dan masalah kesehatan, pada tahun 1909 Treub mengundurkan diri dari jabatannya yang kemudian digantikan oleh Hermann Lovink. Lovink merupakan salah satu pihak yang mengkritik Treub dan menyetujui bahwa upaya pendekatan pada petani harus dilakukan dalam proyek

modernisasi. Untuk merealisasikan upaya tersebut maka dibentuklah layanan penyuluhan (*voorlichtingsdienst*) yang bertujuan menjadi penghubung antara Dinas Pertanian dan penduduk. Pekerjaan layanan penyuluhan yaitu mengadakan demonstrasi lahan uji coba (*proefelden*) yang dilakukan di lahan milik penduduk dengan dukungan lengkap meliputi varietas bibit baru, teknik penanaman ilmiah, penggunaan pupuk, dan bahkan lumbung padi yang juga digunakan sebagai koperasi (Suzanne Moon, 2007: 56).

Cita-cita para reformer etis pada berbagai perdebatan penentuan arah kebijakan di Hindia Belanda seringkali bertentangan dengan pihak perkebunan ekspor. Seperti dalam permasalahan beras pada dekade kedua abad-20 seperti yang disebutkan sebelumnya dengan pengurangan 25% lahan perkebunan tebu, pihak perkebunan kembali memunculkan “pertanyaan beras”. “Pertanyaan beras” merujuk pada pertanyaan, apa yang yang sebenarnya diinginkan penduduk, beras atau tebu yang dapat menghasilkan uang. Hal tersebut sebagai upaya mempertahankan status quo perkebunan tebu dalam perdebatan yang selalu terganjal oleh para reformer etis yang merujuk pada kebijakan kesejahteraan melalui modernisasi pertanian padi. Ketika pintu depan tidak dapat dilakukan maka pihak perkebunan melakukan jalan melalui pintu belakang dengan menjadikan Sibinga Mulder sebagai direktur Departemen Pertanian pada 1918 hingga 1922 (Suzanne Moon, 2007: 75).

Pada masa Mulder menjabat, arah kebijakan diarahkan pada upaya memenuhi kekurangan beras dengan pertanian padi mekanik atau yang dinamakan proyek *Selatdjaran* di hilir aliran Sungai Musi. Alih-alih bukan fokus terhadap pertanian padi di Jawa, anggaran yang dipandang dapat digunakan untuk pertanian di Jawa digunakan dalam menciptakan proyek yang memakan banyak biaya tersebut. Pasalnya dalam melakukan proyek tersebut diperlukan penelitian selama 1 tahun di Amerika (Louisiana dan Texas) berikut perlengkapan pertanian yang modern (berbagai macam traktor). Tujuan proyek *selatdjaran* tidak lain untuk mencukupi kebutuhan beras dalam negeri, juga investasi dan mengurangi biaya impor. Proyek ini dilakukan pada 1919 dengan diawali pembukaan lahan dan dilanjutkan dengan penanaman dan perawatan dengan metode ilmiah modern. Pada

tahun 1923 hasil produksi mengalami penurunan drastis disebabkan hama penyakit. Kritikan muncul kemudian dan baru disadari bahwa kegagalan tersebut sebenarnya dapat ditanggulangi dengan pembukaan lahan secara bertahap oleh penduduk yang dalam hal ini dapat mengurangi beban biaya (Suzanne Moon, 2007: 85 dan 89-90).

Dengan melihat beberapa keadaan seperti masih sulinya mengubah pemikiran penduduk dan perekonomian uang yang fluktuasi, bersamaan dengan kemunculan pemikiran J. H. F Boeke, menyebabkan arah kesejahteraan mengalami perkembangan. Pemikiran Boeke yang terkenal yaitu mengenai ekonomi dualistik, menyebutkan bahwa di Hindia Belanda terdiri dari ekonomi penduduk yang prakapitalis dan ekonomi kapitalis (G. H. A. Prince, “dalam Thomas Lindblad, 2000: 233). Dua perbedaan ini tidak dapat disatukan dengan cara pandang Eropa, karena penduduk memiliki alam pikirannya sendiri. Kritik Boeke terhadap proyek Departemen Pertanian yaitu mengubah pada yang perlu atau dapat diubah bukan. Sebelumnya proyek departemen berkuat pada penduduk tani secara umum. Boeke menganjurkan agar mengubah dari petani kaya yang rasional ekonomi, sehingga akan memberikan efek gelombang pada petani lainnya. Pemikiran Boeke menjadi jembatan antara reformer etis dan para pakar penyuluh yang telah mengalami dan melihat detail dalam masyarakat (Suzanne Moon, 2007: 101-102).

Menjelang dan memasuki tahun 1930-an dengan semakin kritisnya gerakan penduduk bumi putra (demo tahun 1920 dan pemberontakan 1926) menyebabkan pemerintah bersikap represif. Keadaan tersebut serta munculnya perdebatan menyebabkan arah kebijakan mengalami perkembangan dari *up-bottom* menjadi *bottom-up*. Pasalnya, dengan merujuk pada pemikiran Boeke, hasil proyek kesejahteraan masih belum mengubah dan diterima penduduk. Akibatnya perlu adanya pendekatan dan mengetahui apa yang menjadi keinginan dari penduduk. Dengan begitu proyek-proyek masa ini dilakukan tidak lain atas keinginan penduduk sendiri. Kebijakan ini juga dapat disebabkan oleh memburuknya keuangan yang puncaknya dapat diketahui dengan memasukkan Departemen Pertanian ke dalam Departemen Urusan Ekonomi pada 1934 (Suzanne Moon, 2007: 101-102; G. H. A. Prince, “dalam Thomas Lindblad, 2000: 246).

D. Geertz dan Kediri

Pada tahun 1950-an Clifford Geertz bersama tim melakukan penelitian kajian masing-masing di wilayah Jawa Timur. Dalam tulisannya tentang pertanian di Indonesia (khususnya Jawa), Geertz mengambil teori dualistik Boeke sebagai dasar pemikiran. Tulisan tersebut cukup fenomenal pada saat itu, yang akibatnya menjadi rujukan dalam penelitian lebih lanjut, hingga kritikan bermunculan setelahnya. Dalam tulisan tersebut perkembangan pertanian di Jawa bersifat mandek atau apa yang disebut dengan involusi. Keadaan yang mandek ini disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan seperti: perkebunan tebu, luas dan hasil tanaman padi, jumlah penduduk, dan sifat kemasyarakatan itu sendiri. Bertolak dari ekonomi dualistik, involusi terjadi dimana desakan perkebunan tebu yang padat modal mendesak pertanian padi. Keadaan demikian ditambah dengan peningkatan jumlah penduduk yang semakin padat dan sistem budaya masyarakat yang berpedoman pada adat yang kuat, termasuk corak perokonomian yang prakapitalis, menyebabkan terjadinya kemandekan (Clifford Geertz, 1976: 111).

Jika diperhatikan tulisan Geertz cenderung pesimistis terhadap keadaan dan masa depan Jawa. Salah satu kritikan muncul dari tulisan R. E. Elson, yang menyebutkan bahwa di Pasuruan masa kolonial tidak terjadi apa yang disebutkan tadi, melainkan terjadi adanya perkembangan baik disektor pendapatan ekonomi penduduk maupun pertanian padi (R. E. Elson, 1984: 223). Hal ini menyebabkan wilayah cakupan penelitan Geertz yang digunakan sebagai model tidak tampak jelas jika merujuk pada Jawa secara keseluruhan. Kemudian baru diketahui bahwa penelitian yang dilakukan pada tahun 1950-an terletak di wilayah Mojokuto (diketahui Pare, Kediri). Dengan demikian perlu untuk mengulas keadaan Kediri masa kolonial sebagaimana poin-poin yang mendukung teori involusi miliknya.

Upaya kesejahteraan melalui modernisasi pertanian di Kediri tampaknya sudah dilakukan sebelum Departemen Pertanian berdiri. Memang upaya penyuluhan sudah dilakukan di berbagai daerah di Jawa sebelum abad-20, hanya saja model seperti yang dilakukan sejak abad-20 belum dilakukan. Ada kemiripan model atau bahkan menginspirasi apa yang dilakukan Gelpke di Tulungagung (masuk wilayah karesidenan Kediri) pada tahun 1870-an dengan proyek

modernisasi pertanian pasca Departemen Pertanian berdiri. Ini semakin jelas dari proyek dari asosiasi konsultan pertanian (yang hasil penelitiannya diterbitkan ke dalam majalah *Landbouw*) tahun 1920-an yang dengan ketat menggunakan model Gelpke (G. H. A. Prince, “dalam Thomas Lindblad, 2000: 250-251).

Hasil kebijakan Departemen Pertanian baik dari proyek pusat maupun dinas penyuluhan dalam memodernisasi pertanian penduduk seperti: memberikan bermacam-macam varietas bibit padi tanaman palawija, stasiun pemurnian benih padi (yang terletak di Bogor, Sidoarjo, dan Nganjuk), metode mengatasi hama penyakit, metode penggunaan pupuk (*orok-orok*, kandang, maupun kimia), sekolah pertanian, lumbung desa (*Jaarboek Van Het Departement Van Landbouw, Nijverheid en Handel In Nederlanch Indie 1902*, 1913: 81). Selain itu didukung oleh perluasan irigasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan berbagai proyek bendungan dan didukung oleh aliran tersier yang dilakukan oleh penduduk. Diketahui di Kediri jumlah penanaman padi di sawah (yang diiri irigasi dibedakan dengan *droge* sawah dan tegalan) dapat dikatakan selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 1900 luasnya mencapai 145.649 bau dan meningkat menjadi 235.398 bau pada 1934. Mengenai jumlah produksi padi sawah mengalami fluktuasi tergantung keadaan (terutama alam). Pada tahun 1900 hasil produksi sebesar 5.618.369 pikul dan tahun 1934 sebesar 5.668.258 pikul (*Kolonial Verslag 1901*, Lampiran LL: 2-4; *Indisch Verslag 1934*: 210 dan 214-215). Jumlah ini belum termasuk hasil produksi padi gogo yang pada beberapa tahun tidak dicantumkan dalam laporan.

Mengenai jumlah penduduk, tercatat pada tahun 1900 jumlah penduduk bumi putra mencapai 1.498.489 jiwa dan meningkat menjadi 2.438.196 jiwa (*Kolonial Verslag 1902*, Lampiran A: 5; *Volkstelling 1930 Deel III Inheemsche Bevolking van Oost-Java*, 1934: 14). Pasca sensus yang dilakukan tahun 1930 data pemutakhiran penduduk tidak dicantumkan dalam laporan pada tahun-tahun berikutnya. Dengan demikian apa yang menjadi tolok ukur Geertz dalam teorinya antara perbandingan hasil produksi dan penambahan penduduk di Kediri dapat diketahui. Pasalnya luas penanaman selalu meningkat, sementara hasil produksi padi meningkat tidak terlalu signifikan, sedangkan jumlah penduduk meningkat

lebih dari separuh dari jumlah penduduk tahun 1900. Perbandingan ini tentu dapat dikatakan semakin menurun, akan tetapi sebagaimana para pengkritiknya, bahwa hasil palawija semakin meningkat sebagai bahan pangan pengganti yang akan dijelaskan pada sub bab berikutnya.

E. Kesempatan yang Hilang?

Dalam tulisannya, Howard Dick menulis bahwa industrialisasi manufaktur di Hindia Belanda pada abad-19 tidak terjadi. Titik permasalahan yang mendasari tulisan ini yaitu andil pendapatan di sektor pertanian tahun 1960 dengan 1990 berkurang dari 50% menjadi 20%. Begitu juga dengan sektor manufaktur non pertanian (off farm) dari 10% menjadi 20% pada tahun yang sama. Keadaan tersebut kemudian menjadi pertanyaan Dick, bahwa mengapa keadaan tersebut tidak terjadi lebih dini, tepatnya abad-19. Pasalnya sejak akhir abad-19 industri gula merupakan industri paling mutakhir di Hindia Belanda bahkan seluruh Asia tenggara. Keadaan ini kemudian tidak memunculkan gelombang industri lain seperti industri manufaktur baik sebagai ekspor maupun kebutuhan dalam negeri. Hal inilah kemudian dipersulit ketika kebutuhan dalam negeri yang semula didatangkan dari Belanda, terdesak oleh barang-barang impor (terutama kain) dari Jepang yang lebih murah (Howard Dick, dalam Thomas Lindblad, 2000: 176 dan 209-210; Dick, Howard, dalam *Journal of Southeast Asian Studies*, Vol. 20, No. 2, hlm 249-250, <https://about.jstor.org/terms>, diakses pada Jumat, 19 Oktober 2018, pukul 20:16 WIB).

Hal yang sama juga diutarakan Geertz bahwa pertanian padi di Indonesia mengalami keadaan hampir sama dengan apa yang dikatakan Dick, yaitu perubahan keberlanjutan atau bahasa yang dipakai Geertz adalah “take off”. Dalam menggambarkan keadaan ini Geertz membandingkan dengan keadaan di Jepang yang dianggapnya mengalami rangkaian masa yang dianggap baik. Berbeda dengan di Indonesia (dengan melihat keadaan saat penelitian Geertz, tahun 1950-an) terjadi rangkaian yang menyebabkan kesempatan *take off* tidak terjadi. Hal ini disebabkan selain pemerintah kolonial tidak sungguh-sungguh merubah ekonomi pasca industri komoditas ekspor juga disebabkan periode yang menghambat seperti krisis

ekonomi tahun 1930-an, Pendudukan Jepang, dan Revolusi Kemerdekaan Indonesia (Clifford Geertz, 1976: 146-147).

Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa pada perkembangannya pemikiran Geertz banyak mendapat kritikan. Para kritikus terutama keberatan dalam penggambaran keadaan yang mandek atau involusi. Pasalnya para penulis belakangan banyak memuat data-data bahwa kemandekan tersebut tidak terjadi. Dalam hal keadaan pangan yang bernada pesimis, para pengkritik menyebutkan bahwa keadaan mengalami perkembangan akibat modernisasi dan perkembangan ekonomi uang. Seperti yang diungkapkan bahwa kendati perluasan lahan pertanian baru telah mencapai puncak pada tahun 1920-an, akan tetapi terjadi intensifikasi dan diversifikasi tanaman palawija (Thomas Lindblad, dalam Thomas Lindblad, 2000: 8-9 dan 18-19).

Program Revolusi Hijau yang mulai dilakukan sejak akhir masa Soekarno dan dilanjutkan masa Soeharto hingga puncaknya terjadi swasembada pangan tahun 1984 menjadi upaya program perbaikan pemerintah di bidang pangan. Bersamaan dengan itu masa Soeharto juga menjadi masa berkembangnya sektor industri *off farm* (Howard Dick dalam *Journal of Southeast Asian Studies*, Vol. 20, No. 2, HLM. 177, <https://about.jstor.org/terms>) Menjelang akhir masa Soeharto, dengan kebijakan difokuskan pada kedirgantaraan, sektor pertanian pangan tampaknya tidak mendapat perhatian.

F. Relevansi dalam Historiografi

Dalam tulisan Budiawan mengenai memori dan sejarah, menyebutkan bahwa sifat dasar memori adalah menubuh pada individu atau secara kolektif, sementara sejarah hanya menempel. Artinya, memori sulit untuk dilepaskan, sementara sejarah lebih rentan untuk berubah. Dalam titik simpang antara memori dan sejarah terjadi ketika munculnya metodologi dalam sejarah yang merujuk pada tradisi positivisme menyebabkan sejarah perlu dipisahkan dari memori. Memori dianggap spontan dan naluriah sehingga kurang dapat dipercaya kesahihannya, sebaliknya, sejarah bersifat rasional dan dianggap lebih dapat dipercaya kesahihannya.

Terjadi titik temu ketika memori yang sudah ‘disejarahkan’ kemudian ditangkap oleh masyarakat masa kini dan diingat. Istilah situs memori seperti: monumen, acara peringatan, dan arsip, menyebabkan memori di sini kemudian tidak lagi bersifat spontan dan naluriah, tetapi sebagai kewajiban untuk mengingat. Dengan demikian situs memori dapat memberikan transfer memori terhadap generasi yang serba baru. Sejarah sejatinya mengarahkan pada suatu peristiwa masa lalu, tetapi memori mengarahkan pada penafsiran yang memiliki kecenderungan ranah yang lebih luas. Pada akhirnya penaklukan sejarah terhadap memori tidak pernah sepenuhnya berhasil. Memori yang menubuh sangat sulit dipisahkan, sementara sejarah yang terlembagakan dapat berubah, baik oleh kekuasaan maupun semangat zaman juga berhubungan dengan konstruksi sosial (Budiawan, 2013: 13).

Tentang sejarah yang dapat berubah, mengutip dari tulisan William J. O’Malley, tahun 1990 bahwa telah terjadi perkembangan pandangan mengenai sistem Tanam Paksa. Dalam historiografi Indonesia sistem Tanam Paksa pada mulanya dianggap jahat, akan tetapi pada perkembangannya menjadi baik bagi Belanda namun jahat bagi Indonesia, bagus bagi sebagian penduduk Indonesia namun jahat bagi golongan lainnya, hingga baik bagi sebagian penduduk Indonesia di daerah-daerah tertentu yang membudidayakan tanaman tertentu namun jahat bagi penduduk lainnya (William J. O’Malley, dalam Anne Booth, dkk., 1988: 36). Dengan demikian dalam kaitannya dengan perkembangan historiografi yang mengulas permasalahan beras dan ide-ide tentang kesejahteraan dapat di telaah sebagai berikut.

Sebelum kebijakan modernisasi pertanian pangan abad-20, ide kesejahteraan yaitu berkuat pada mengubah ekonomi penduduk yang prakapitalis menjadi turut serta dalam ekonomi kapitalis yang diarahkan dalam sektor komoditas ekspor. Hal ini dapat dilihat dari para tokoh reformer awal mulai dari Hogendorp, Raffles, hingga Du Bus. Keadaan yang cenderung membuat “frustasi” para reformer (termasuk Bosch) memunculkan narasi pribumi malas. Narasi malas ini kemudian mendapat *counter* melalui tulisan S. H. Alatas, yang menyebutkan kemalasan penduduk bumi putra disebabkan oleh reaksi tidak paham dan keberatan dalam

penerapan sistem kapitalis (S. H. Alatas, 1988: 40-41). Kemalasan tersebut dipandang berdasarkan sudut pandang orang Eropa yang belum memahami alam pikiran penduduk bumi putra. Baru kemudian narasi tersebut sedikit dipahami melalui diskusi tahun 1870-an tentang kegagalan liberalisasi tanah masa awal.

Memasuki abad-20 pemahaman ini berlanjut seperti dalam perubahan pada penduduk dapat terjadi dengan adanya inovasi melalui teknologi. Akibatnya kesejahteraan dengan bantuan teknologi menjadi kebijakan yang ditempuh. Kemudian mengenai alam pikiran penduduk, yaitu arah kebijakan kesejahteraan dengan tidak mengadakan proyek skala besar besar, melainkan proyek skala kecil dengan metode *printah aloes*. *Printah aloes* sendiri merujuk pada pengajaran dan pembimbingan dengan adanya hubungan antara guru dan murid agar perubahan yang diharapkan pemerintah dapat terjadi (G. H. A. Prince, “dalam Thomas Lindblad, 2000: 249). Narasi ini kemudian memunculkan dinas penyuluhan dan pendidikan pertanian bagi penduduk bumi putra.

Memasuki tahun 1920-an dengan keadaan perubahan yang belum memuaskan karena masyarakat dianggap masih kuat terhadap alam pikirannya, maka tulisan Boeke telah mempengaruhi arah kebijakan saat itu. Dengan teori dualistiknya, Boeke menyarankan bahwa untuk mengarahkan penduduk pada hal diinginkan tidak dapat dipandang berdasarkan kaca mata orang Eropa. Penduduk pribumi dalam motivasi ekonomi bukan sekadar pada untung dan rugi dalam aspek ekonomi melainkan sosial juga diperhatikan. Sebagai contoh dalam kekayaan dengan kepemilikan ternak yang banyak, bagi penduduk bukan kekayaan harta maupun benda saja melainkan gengsi dalam status sosial. Hal inilah yang kemudian Boeke menganjurkan agar mengubah yang perlu diubah, dalam hal ini tertuju pada petani kaya, yang memotivasi petani lain agar turut serta dalam perubahan (Suzanne Moon, 2007: 101-102).

Pasca kemerdekaan ditandai sebagai masa dekolonialisasi, dengan corak anti kolonialisasi. Tulisan Geertz dan Karl Pelzer tempat mewakili masa tersebut karena cenderung mengkritik kolonialisasi Belanda juga menggambarkan permasalahan sezaman. Baru kemudian kritikan bermunculan terhadap pandangan Geertz dan teori Malthus tentang dampak modernisasi yang dilakukan pada masa

kolonial (Karl J. Pelzer, 1971: 138). Tulisan lainnya yaitu, Booth menyebutkan terjadi perdebatan tentang praktek kolonialisasi yang terdiri dari golongan “lunak” dan “radikal”. Golongan pertama cenderung menekankan keuntungan yang didapat oleh penduduk bumi putra dalam turut sertanya ke dalam ekonomi kapitalisme, sementara golongan kedua menggarisbawahi bahwa segala macam bentuk kolonialisasi tentu akan merugikan negeri jajahan. Booth sendiri menganggap bahwa keuntungan ekspor dari usaha di Hindia Belanda banyak mengalir ke negeri induk bukannya untuk pembangunan di negeri koloni (Anne Booth, dkk., 1988: 365 dan 368).

KESIMPULAN

Permasalahan beras masa kini tidak dapat dipisahkan dengan permasalahan beras masa lampau. Perkembangan ekonomi uang dan industri manufaktur (off farm) menggantikan industri berorintasi pada pertanian menyebabkan permasalahan beras masa kini bukan sekedar produksi, melainkan akses distribusi maupun harga. Kebijakan impor masa kini dilakukan selain menjaga stabilitas kebutuhan dan harga juga menjadi indikasi bahwa hasil produksi tidak sebanding dengan pertambahan jumlah penduduk. Kebijakan impor masa lalu juga dihadapkan oleh permasalahan yang sama. Dalam pandangan dualistik, proyek pemerintah kolonial di Hindia Belanda yaitu menghasilkan keuntungan melalui usaha hasil komoditas ekspor maupun perdagangan dalam negeri, juga mempertahankan kondisi tertentu penduduk bumi putra agar kolonialisasi tetap berlanjut. Upaya yang dilakukan pemerintah yaitu dengan proyek kesejahteraan yang secara khusus ditujukan pada pertanian pangan. Kondisi yang serupa juga terlihat dari kemandekan perluasan lahan pertanian, yang mana pada tahun 1920-an mencapai puncaknya, sedangkan kini lahan-lahan mengalami penyempitan akibat infrastruktur. Keadaan tersebut dapat diatasi dengan intensifikasi dan diversifikasi akibat bantuan teknologi. Akan tetapi menilik kondisi pandemi saat ini dengan dampak ekonomi yang meluas, mengingatkan kembali kasus seabad yang lalu. Hal ini merujuk pada pandangan Geertz dan Malthus yang banyak mendapat kritik yang tertuang dalam tulisan-

tulisan kekinian, tentu timbul pertanyaan masih relevankah secara konteks mengenai teori-teori pertanian terdahulu.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip

Indisch Verslag 1934.

Jaarboek Van Het Departement Van Landbouw, Nijverheid en Handel In Nederlanch Indie 1902, Batavia: Landsdrukkerij, 1913.

Kolonial Verslag 1901.

Kolonial Verslag 1902.

Sollewijn Gelpke, J. H. F., *De Padie Kultuur in de Afdeeling Ngrowo*, Snelpelsdruk Ogilvie & Co., 1877.

_____, *De Rijstkultuur in Italie en Op Java*, Leiden: 'S Gravenhage Martinus Nijhoff, 1874.

Volkstelling 1930 Deel III Inheemsche Bevolking van Oost-Java. Batavia: Departement van Economische Zaken, 1934.

Artikel dan Buku

Alatas, S. H., *Mitos Pribumi Malas, Citra Orang Jawa, Melayu dan Filipina dalam Kapitalisme Kolonial*, Jakarta: LP3ES, 1988.

Bambang Sulistyono, *Pemogokan Buruh, Sebuah Kajian Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995.

Booth, Anne, dkk., (peny.), *Sejarah Ekonomi Indonesia*, terj. Mien Joebhaar, Jakarta: LP3ES, 1988.

Budiawan, (ed.), *Sejarah dan Memori: Titik Simpang dan Titik Temu*, Yogyakarta: Ombak, 2013.

Burger, D. H., *Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia, Jilid I*, terj. Prajudi Atmosudirdjo, Jakarta: Pradnja Paramita, 1962.

Elson, R. E., *Javanese Peasant and the Colonial Sugar Industry, Impact and Change in an East Java Residency 1830-1940*, Singapore: Oxford University Press, 1984.

Geertz, Clifford, *Involusi Pertanian, Proses Perubahan Ekologis di Jawa*, terj. S. Seopomo, Jakarta: Bhratara, 1976.

Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak, 2007.

Husken, Frans, *Masyarakat Desa dalam Perubahan Zaman, Sejarah Diferensiasi Sosial di Jawa*, terj. Anonim, Jakarta: Grasindo, 1998.

Lindblad, Thomas, (ed.), *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia: Berbagai Tantangan Baru*, terj. M. Arief Rohman dan Bambang Purwanto, Jakarta: LP3ES, 2000.

Moon, Suzanne, *Technology and Ethical Idealism, A History of Development in the Netherlands East Indies*, Leiden: CNWS Publications, 2007.

Pelzer, Karl J., "The Agricultural Foundation" dalam Bruce Glassburner (ed.), *The Economy of Indonesia: Selected Readings*, Ithaca: Cornell University Press, 1971.

Internet

Dick, Howard, "Japan's Economic Expansion in the Netherlands Indies between the First and Second World Wars", dalam *Journal of Southeast Asian Studies*, Vol. 20, No. 2, <https://about.jstor.org/terms>.

<https://ekonomi.kompas.com/jeo/menunggu-eksplorasi-kebijakan-jokowi-dan-prabowo-soal-ketahanan-pangan>

<https://historia.id/amp/sains/articles/seabad-flu-panyol-DBKbm>

<https://m.bisnis.com/amp/read/20200418/99/1229121>

<https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20180827125206-92-325183/menteri-enggar-klaim-impor-beras-demi-jaga-harga>.

<https://republika.co.id/amp/qg0ymn383>

<https://www.beritasatu.com/amp/nasional/799153>

<https://www.google.com/amp/s/www.jawapos.com/ekonomi/09/02/2019/jika-terpilih-ini-fokus-prabowo-sandi-di-sektor-pangan/%3famp>.

<https://www.kompas.com/sains/read/2020/11/02/190300423/pandemi-ancam-krisis-ketahanan-pangan-apa-yang-harus-dilakukan-?page=all>